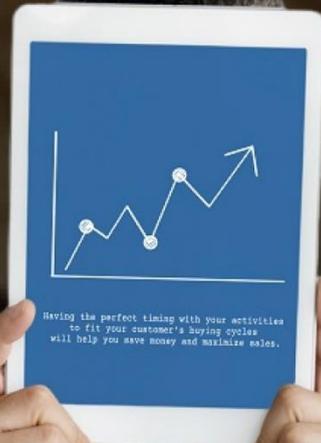

Ilmu Ekonomi:

Teori, Kebijakan, dan Realitas



Puti Mandasari, S.E., M.E., Dr. Sumiyarti, ME., Chairul Sa'roni, SE., M.Si.,
Lina Suherty, SE., MP., Stephanus Eri Kusuma, S.E., M.Sc.,
Abdurrahim, SEI., MM., Drs. Zainuddin Nasution, MAP.,
Alif Dewantara, SE., ME., Ali Wardhana, S.P., M.Si.,
dan Cholidah Nur Khasana, M.E.

Ilmu Ekonomi: Teori, Kebijakan, dan Realitas

Puti Mandasari, S.E., M.E.

Dr. Sumiyarti, ME.

Chairul Sa'roni, SE., M.Si.

Lina Suherty, SE., MP.

Stephanus Eri Kusuma, S.E., M.Sc.

Abdurrahim, SEI., MM.

Drs. Zainuddin Nasution, MAP.

Alif Dewantara, SE., ME.

Ali Wardhana, S.P., M.Si.

Cholidah Nur Khasana, M.E.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Ilmu Ekonomi: Teori, Kebijakan, dan Realitas

Penulis : Puti Mandasari, S.E., M.E., Dr. Sumiyarti, ME.,
Chairul Sa'roni, SE., M.Si., Lina Suherty, SE., MP.,
Stephanus Eri Kusuma, S.E., M.Sc., Abdurrahim,
SEL., MM., Drs. Zainuddin Nasution, MAP., Alif
Dewantara, SE., ME., Ali Wardhana, S.P., M.Si., dan
Cholidah Nur Khasana, M.E.
ISBN : 978-634-250-006-4 (PDF)
Penyunting Naskah : Ahmad Fauzy Pratama, S.Pd.
Tata Letak : Ahmad Fauzy Pratama, S.Pd.
Desain Sampul : Fahri Firliansyah

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya
No. 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm.
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email : penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp : 0878-3483-2315

Website : bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul *Ilmu Ekonomi: Teori, Kebijakan, dan Realitas* ini dapat tersusun dengan baik dan hadir sebagai bacaan yang ditujukan untuk masyarakat umum, guna memberikan pemahaman yang utuh dan mudah dicerna tentang bagaimana ilmu ekonomi bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini disusun dengan tujuan memperkenalkan konsep-konsep dasar ekonomi, mulai dari teori ekonomi mikro dan makro, kebijakan pemerintah, hingga bagaimana berbagai kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Penjelasannya dibuat ringkas, aplikatif, dan disertai contoh nyata yang dekat dengan realitas sosial dan ekonomi di sekitar kita.

Diharapkan, buku ini dapat menjadi jembatan antara teori ekonomi yang sering dianggap kompleks dengan dunia nyata yang lebih membumi dan bisa dipahami oleh siapa saja, termasuk pelajar, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat umum yang ingin lebih sadar terhadap dinamika ekonomi.

Jakarta, Juli 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Evolusi Pemikiran Ekonomi	1
1.1 Pengertian dan Pentingnya Pemikiran Ekonomi	1
1.2 Periode Awal Pemikiran Ekonomi	5
1.3 Revolusi Industri dan Pemikiran Ekonomi Klasik	7
1.4 Pemikiran Ekonomi Modern	10
1.5 Tantangan dalam Evolusi Pemikiran Ekonomi	13
Bab 2: Konsep Kelangkaan dan Pilihan dalam Ekonomi	16
2.1 Pengertian Kelangkaan dalam Ekonomi.....	16
2.2 Faktor Penyebab Kelangkaan	18
2.3 Pilihan dalam Ekonomi	21
2.4 Kurva Kemungkinan Produksi (PPF)	23
2.5 Relevansi Kelangkaan dan Pilihan dalam Kehidupan Sehari-hari	29
Bab 3: Teori Pasar dan Keseimbangan Ekonomi.....	32
3.1 Pengertian Pasar dalam Ekonomi	32
3.2 Jenis-Jenis Pasar	33
3.3 Hukum Permintaan dan Penawaran.....	35
3.4 Keseimbangan Pasar.....	37
3.5 Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pasar	39
Bab 4: Produksi, Biaya, dan Keuntungan	42
4.1 Pengertian Produksi dalam Ekonomi	42
4.2 Faktor-Faktor Produksi.....	43
4.3 Biaya Produksi.....	45
4.4 Fungsi Produksi	47
4.5 Keuntungan.....	50

Bab 5: Kebijakan Moneter dan Fiskal.....	52
5.1 Sekilas Kebijakan Moneter dan Fiskal	52
5.2 Peran Bank Sentral dan Pemerintah	54
5.3 Kebijakan Moneter	55
5.4 Kebijakan Fiskal.....	60
5.5 Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Fiskal	65
Bab 6: Ekonomi Global: Perdagangan dan Investasi Internasional.....	68
6.1 Pengertian Ekonomi Global.....	68
6.2 Teori Perdagangan Internasional	70
6.3 Kegunaan dan Tantangan Perdagangan Internasional	72
6.4 Investasi Internasional	73
6.5 Dampak Globalisasi Ekonomi	75
Bab 7: Ekonomi Perkembangan: Strategi untuk Negara Berkembang.....	79
7.1 Pengertian Ekonomi Perkembangan.....	79
7.2 Karakteristik Negara Berkembang	80
7.3 Strategi Pembangunan untuk Negara Berkembang	82
7.4 Peran Bantuan dan Kerjasama Internasional	85
7.5 Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi	87
Bab 8: Keuangan Publik dan Manajemen Anggaran Negara .	91
8.1 Pengertian Keuangan Publik	91
8.2 Sumber Pendapatan Negara.....	94
8.3 Pengeluaran Negara.....	99
8.4 Manajemen Anggaran Negara.....	104
8.5 Tantangan dalam Keuangan Publik.....	106
Bab 9: Ekonomi Lingkungan dan Isu Keberlanjutan	112
9.1 Pengertian Ekonomi Lingkungan	112
9.2 Konsep Keberlanjutan	113
9.3 Masalah Lingkungan Global	115

9.4 Masalah Lingkungan di Indonesia.....	118
9.5 Alat Ekonomi untuk Pengelolaan Lingkungan.....	122
9.6 Strategi untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	125
Bab 10: Masa Depan Ekonomi: Tren dan Tantangan Baru..	128
10.1 Tren Ekonomi Masa Depan.....	128
10.2 Tantangan Ekonomi Masa Depan.....	132
10.3 Inovasi dan Teknologi Baru	135
10.4 Kebijakan untuk Menghadapi Tantangan Masa Depan.....	139
10.5 Peran Individu dalam Ekonomi Masa Depan	142
Profile Penulis.....	146
Daftar Pustaka.....	162

Bab 5: Kebijakan Moneter dan Fiskal

Stephanus Eri Kusuma, S.E., M.Sc.



5.1 Sekilas Kebijakan Moneter dan Fiskal

Kebijakan ekonomi makro, baik yang diinisiasi oleh pemerintah ataupun otoritas moneter, didasari pada kebutuhan untuk mengelola naik turunnya (siklus) pembangunan ekonomi di suatu negara sehingga sisi permintaan dan penawaran dalam perekonomian mengarah pada kondisi keseimbangan yang merefleksikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Juhro & Rummel, 2022). Kebijakan moneter dan fiskal adalah dua alat dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam mengelola perekonomian, khususnya untuk menciptakan kondisi ekonomi makro yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja,

tanpa menimbulkan inflasi (Campbell, 2020). Dalam kerangka ini, kebijakan moneter dan fiskal menjadi sarana bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mencapai sejumlah tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta pengurangan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Kebijakan moneter dan fiskal memang memiliki tujuan akhir yang serupa. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan terkait pihak yang menyelenggarakan, cara dan instrumen yang digunakan untuk mempengaruhi perekonomian, serta sifat dampak yang ditimbulkan. Kebijakan moneter mencakup upaya pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Sentral dengan berbagai instrumen moneter, diantaranya pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka (*open market operations*), kebijakan diskonto (*discount policy*) dan persyaratan cadangan (*reserve requirement*). Sementara itu, kebijakan fiskal mencakup upaya pemerintah untuk mengelola sumber pendapatan negara (baik pajak maupun non-pajak) untuk berbagai jenis pengeluaran yang mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Sejumlah instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah mencakup kebijakan perpajakan, subsidi, serta berbagai jenis pengeluaran publik.

Lindsey & Wallich (2018) menyatakan bahwa kebijakan moneter memiliki dampak yang tidak langsung terhadap pengeluaran dan investasi masyarakat. Dampak yang muncul dari kebijakan moneter tergantung pada respon para pelaku ekonomi terhadap perubahan kondisi moneter dan keuangan karena perubahan kebijakan. Sebagai contoh, dalam konteks produsen,

penurunan suku bunga *Bank Indonesia* berpotensi menurunkan tingkat bunga kredit dan selanjutnya berpotensi meningkatkan investasi. Meskipun demikian, kenaikan investasi tergantung dengan kecenderungan penurunan tingkat bunga pinjaman di bank-bank. Sementara itu, dampak dari kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran dan investasi masyarakat secara langsung.¹ Sebagai contoh, dalam konteks konsumen, pajak pendapatan akan menurunkan pengeluaran karena adanya penurunan pendapatan. Sebaliknya, subsidi akan meningkatkan pengeluaran.

5.2 Peran Bank Sentral dan Pemerintah

Bank sentral (sebagai otoritas moneter) dan pemerintah (sebagai otoritas fiskal) merupakan aktor dalam perekonomian yang merencanakan dan melaksanakan. Oleh karena itu, keduanya berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Meskipun bank sentral dan pemerintah berada pada koridor operasional yang berbeda, keduanya bekerja dan perlu bersinergi untuk mencapai tujuan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja.

Bank sentral bertanggung jawab dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter sesuai target tujuan nasional yang akan dicapai. Bank sentral berperan utama dalam mengatur jumlah uang beredar, di masyarakat. Sementara itu, pemerintah

¹ *Ibid.*

bertanggungjawab dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan fiskal sesuai dengan tujuan nasional yang ditargetkan. Pemerintah berperan utama dalam mengelola sumber-sumber penerimaan negara (terutama perpajakan) dan anggaran belanja negara. Pemerintah memutuskan berapa banyak alokasi dana yang didistribusikan untuk berbagai macam program, mulai dari subsidi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan terkait sumber-sumber penerimaan negara, terutama terkait perpajakan. Pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan terkait defisit anggaran sehingga utang publik agar tidak membebani perekonomian dalam jangka panjang.

5.3 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk memengaruhi kondisi moneter dan keuangan secara keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan perekonomian yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keterserapan tenaga kerja yang tinggi dan kestabilan harga (Lindsey & Wallich, 2018). Tujuan kebijakan moneter tidak dapat dilepaskan dari tujuan bank sentral, yaitu mempertahankan kestabilan ekonomi yang disertai dengan inflasi rendah dan stabil, tingkat pengangguran rendah, tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, koordinasi yang

efektif dengan kebijakan fiskal, serta kestabilan kurs mata uang (Samuelson & Nordhaus, 2010).²

Kebijakan moneter menjadi bagian integral dari kebijakan makroekonomi yang perlu mempertimbangkan siklus bisnis, tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara, serta faktor ekonomi yang fundamental lainnya (Juhro & Rummel, 2022). Mengacu pada Juhro dan Rummel, dalam era globalisasi yang mendorong peningkatan keterbukaan perekonomian (ditandai dengan peningkatan perdagangan internasional dan aliran modal asing), perekonomian suatu negara cenderung dipengaruhi kondisi perekonomian internasional. Oleh karena itu, kebijakan moneter semakin perlu mempertimbangkan variabel ekonomi internasional.

Dalam menjalankan kebijakan moneter, bank sentral memanfaatkan sejumlah alternatif instrumen berikut (Mishkin, 2019; Samuelson & Nordhaus, 2010; Warjiyo & Juhro, 2019):

- a. Kebijakan suku bunga acuan: Suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral (misalnya: *BI rate* dan *BI reverse-repo rate*). Kenaikan suku bunga acuan ini akan mempengaruhi tingkat bunga pasar antar bank dan ekspektasi pasar terhadap proyeksi makroekonomi. Selanjutnya, hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga tabungan dan suku bunga kredit. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kecenderungan untuk menabung dan

² Dalam konteks Indonesia, tujuan utama kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai kestabilan nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan (<https://www.bi.go.id/id>).

menurunkan minat pengusaha untuk mengajukan kredit investasi. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat akan cenderung menurun.

- b. Operasi pasar terbuka (*open market operations*): Operasi pasar terbuka melibatkan proses pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah secara terbuka di pasar. Pembelian surat berharga pemerintah oleh bank sentral diprediksi akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sementara penjualan surat berharga diprediksi akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sejumlah literatur menyebutkan operasi pasar terbuka menjadi instrumen kebijakan moneter yang paling dasar dan paling mendominasi sejak tahun 1950an dibandingkan kebijakan lainnya karena kecepatan dalam implementasi, fleksibilitas terhadap skala basis moneter, serta kemudahan untuk dikoreksi (*easily reversed*) (Bordo, 2018; Mishkin, 2019).
- c. Fasilitas pinjaman dari bank sentral atau fasilitas diskonto (*discount–window lending*): Fasilitas ini merupakan fasilitas pinjaman yang dapat diberikan bank sentral kepada bank komersial serta lembaga keuangan, dimana bank sentral dapat melakukan perubahan tingkat bunga serta persyaratan jaminan pinjaman (*collateral*) sesuai tujuan kebijakan moneter yang ingin dicapai. Fasilitas ini diberikan kepada bank atau lembaga keuangan yang memerlukan tambahan dana likuid untuk perluasan (skala) usaha ataupun untuk

mengatasi kondisi darurat. Fasilitas pinjaman ini juga memfasilitasi peran bank sentral sebagai ‘*the lender of last resort*’ bagi bank atau lembaga keuangan mengalami kesulitan likuiditas. Penurunan tingkat bunga fasilitas ini berpotensi meningkatkan *interest* bank untuk menggunakan fasilitas pinjaman ini sehingga berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar.

- d. Kebijakan giro wajib minimum (*reserve-requirement policy*): Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan dan mengubah persyaratan giro wajib minimum, persentase tertentu dari nilai *checkable deposit* bank-bank dan lembaga keuangan lain yang dialokasikan sebagai cadangan lembaga. Selain menjadi instrument bank sentral untuk mengendalikan peredaran uang, kebijakan ini juga menjadi sarana untuk mengurangi potensi kegagalan bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi penarikan tabungan nasabahnya sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya krisis finansial. Semakin rendah giro wajib minimum, maka semakin rendah proporsi dana yang disimpan dalam sistem perbankan. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat.

Berbagai alternatif instrumen kebijakan moneter di atas berpotensi mempengaruhi pasar keuangan serta pasar barang dan jasa serta selanjutnya mempengaruhi kondisi inflasi dan output (Warjiyo & Juhro, 2019). Hal ini relevan dengan kecenderungan saat ini bahwa kebijakan moneter semakin diarahkan agar berjalan pada

kerangka penargetan inflasi (*inflation targeting framework / ITF*), dimana tujuan utama kebijakan moneter adalah membawa dan mempertahankan tingkat inflasi yang rendah dengan disertai keterbukaan kepada publik terkait target inflasi (Juhro & Rummel, 2022).

Kebijakan moneter dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif (Juhro & Rummel, 2022). Kebijakan moneter ekspansif berorientasi untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dengan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Semetara itu, kebijakan moneter kontraktif berorientasi untuk memperlambat laju aktivitas perekonomian dengan upaya-upaya menurunkan jumlah uang beredar.

Kebijakan moneter ekspansif dilatarbelakangi oleh kondisi krisis atau resesi yang dialami oleh suatu perekonomian. Kebijakan moneter ekspansif diambil sebagai sarana untuk menstimulasi permintaan agregat dan mendorong aktivitas ekonomi, terutama ketika terjadi resesi atau perlambatan ekonomi. Kebijakan ini digunakan untuk menghadapi situasi di mana pertumbuhan ekonomi melambat dan ada risiko deflasi atau pengangguran tinggi. Kebijakan moneter ekspansif diharapkan dapat mendorong lebih banyak pinjaman dan investasi sektor swasta, serta meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kebijakan moneter ekspansif dapat dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah instrumen berikut, yaitu: (1) penurunan suku bunga acuan bank sentral, (2) pembelian surat berharga pemerintah, (3) penurunan tingkat bunga atau pelonggaran

persyaratan fasilitas diskonto, atau (4) penurunan giro wajib minimum.

Kebijakan moneter kontraktif dilatarbelakangi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi (*overheating*) yang dialami oleh suatu perekonomian, biasanya ditandai dengan tingkat inflasi yang meningkat tajam. Kebijakan ini biasanya digunakan untuk mengendalikan inflasi yang tinggi atau untuk mencegah perekonomian yang tumbuh terlalu cepat. Kebijakan moneter kontraktif dapat dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah instrumen berikut, yaitu: (1) peningkatan suku bunga acuan bank sentral, (2) penjualan surat berharga pemerintah, (3) kenaikan tingkat bunga atau pengetatan persyaratan fasilitas diskonto, atau (4) kenaikan giro wajib minimum.

Kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif memiliki peran yang saling berlawanan (kontradiktif) dalam pengelolaan perekonomian. Kebijakan ekspansif menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam situasi resesi atau stagnasi, sementara kebijakan kontraktif diterapkan dalam situasi *overheating* perekonomian. Bank sentral harus memanfaatkan penggunaan kedua kebijakan ini dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas perekonomian jangka panjang.

5.4 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan keputusan-keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan upaya memperoleh penerimaan

dan pengalokasian penerimaan tersebut untuk belanja publik (Carlin & Soskice, 2025). Mengacu pada El-Khoury (2002), kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi terkait dengan pengalokasikan sumber daya dalam produksi barang privat dan sosial serta penentuan kombinasi barang sosial yang akan disediakan. Sementara itu, fungsi distribusi terkait dengan mekanisme penyesuaian pendapatan atau kekayaan untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Fungsi stabilisasi terkait dengan pencapaian sejumlah tujuan utama ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan keseimbangan eksternal. Sementara itu, menurut (Carlin & Soskice, 2025), kebijakan fiskal berorientasi untuk mewujudkan sejumlah tujuan berikut, yaitu:

- a. Redistribusi pendapatan: Kebijakan fiskal menjadi sarana untuk mengumpulkan penerimaan negara melalui pajak dan melakukan redistribusi penerimaan pajak tersebut melalui subsidi dan bantuan sosial. Mekanisme ini menjadi sarana untuk mengupayakan pemerataan pendapatan antar masyarakat.
- b. Alokasi sumber daya: Kebijakan fiskal dapat menjadi sarana pengalokasian sumber daya sehingga dapat menjadi lebih efisien, optimal, dan semakin memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai tambahan, kebijakan fiskal dapat menjadi sarana untuk mewujudkan *interest* dan prioritas pembangunan ekonomi yang disasar pemerintah (Campbell, 2020). Contohnya adalah pemerintah

memberikan subsidi bagi industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan (misalnya pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan lapangan kerja atau industri teknologi untuk mendorong inovasi teknologi).

- c. Penyediaan barang publik: Kebijakan fiskal menjadi sarana bagi pemerintah untuk menyediakan barang atau jasa publik (bersifat *non-excludable* dan *non-rivalry*) yang tidak dapat diproduksi oleh secara efisien oleh swasta, misalnya: pertahanan negara serta layanan penyediaan data moneter dan keuangan publik. Selain itu, kebijakan fiskal mendorong penyediaan barang *merit*—yang biasanya dikontestasikan secara politik— karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat, misalnya layanan pendidikan dan kesehatan.
- d. Jaringan pengaman sosial dalam kondisi darurat di tengah masyarakat (*insurer of last resort*): Kebijakan fiskal menjadi sarana untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat dalam kondisi darurat (misalnya pandemi atau perang). Sebagai contoh, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi, dimana aktivitas ekonomi menurun signifikan, serta menetapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pada masa pasca pandemi.

Instrumen kebijakan fiskal mencakup berbagai kebijakan terkait sumber penerimaan pemerintah terutama perpajakan pajak, alokasi pengeluaran pemerintah, dan utang publik. Penggunaan

instrument kebijakan fiskal, secara langsung akan mempengaruhi permintaan agregat seiring dengan peningkatan pendapatan dan pengeluaran yang dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam perekonomian.

1. Kebijakan perpajakan: Kenaikan pajak cenderung menurunkan pendapatan dan mengurangi ketersediaan dana untuk pembiayaan pengeluaran konsumen maupun pelaku usaha. Hal ini berimplikasi pada penurunan konsumsi dan investasi sehingga menurunkan permintaan agregat. Sebaliknya, penurunan pajak cenderung meningkatkan pendapatan dan menambah ketersediaan dana untuk pengeluaran masyarakat (konsumen maupun pelaku usaha) sehingga meningkatkan permintaan agregat.
2. Pengeluaran pemerintah: Peningkatan pengeluaran pemerintah melalui subsidi maupun penyediaan berbagai barang publik menjadi sarana untuk meningkatkan ketersediaan dana yang dapat dialokasikan oleh konsumen maupun pelaku usaha untuk membeli barang dan jasa untuk konsumsi dan investasi. Hal ini mendorong konsumsi dan investasi dan, selanjutnya meningkatkan permintaan agregat. Sebaliknya, peningkatan penurunan pengeluaran pemerintah berpotensi mengurangi ketersediaan dana yang dapat dialokasikan oleh konsumen maupun pelaku usaha untuk membeli barang dan jasa untuk konsumsi dan investasi. Selanjutnya, hal tersebut mengurangi permintaan agregat.

3. Utang publik: Utang publik terjadi jika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan pemerintah, atau biasa disebut deficit anggaran. Utang publik dapat berupa penerbitan obligasi pemerintah atau pinjaman dari berbagai pihak. Dalam jangka pendek, utang publik menjadi sarana untuk memfasilitasi peningkatan pengeluaran pemerintah sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan permintaan agregat. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, utang publik harus dibayar sehingga mengurangi alokasi dana pemerintah untuk mendorong konsumsi dan investasi. Hal ini berimplikasi pada penurunan permintaan agregat.

Kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Seperti kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk menstimulasi permintaan agregat ketika perekonomian mengalami resesi atau perlambatan pertumbuhan. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menurunkan pajak atau meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat ditingkatkan dengan meningkatkan subsidi, pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, atau program sosial. Sementara itu, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk mengendalikan inflasi dan mencegah perekonomian yang terlalu cepat berkembang (*overheating*) dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal kontraktif berorientasi untuk menstabilkan perekonomian dan menghindari terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan

menaikkan pajak atau dengan mengurangi pengeluaran pemerintah (seperti pemotongan anggaran belanja dalam kerangka efisiensi, penundaan proyek-proyek infrastruktur, penghapusan subsidi, pengurangan bantuan sosial).

5.5 Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Fiskal

Implementasi kebijakan moneter dan fiskal sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan dampaknya terhadap perekonomian. Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal mencakup keterlambatan waktu (*time lag*), persoalan konflik tujuan dan koordinasi moneter–fiskal, serta dampak globalisasi.

1. Keterlambatan waktu (*time lag*)

Penerapan kebijakan fiskal atau moneter seringkali tidak langsung atau segera dirasakan atau diobservasi dampaknya bagi perekonomian. Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan moneter, operasi pasar terbuka atau perubahan *BI-rate* tidak secara langsung mendorong perubahan konsumsi dan investasi. Hal ini karena konsumen dan pelaku usaha membutuhkan waktu untuk mencari dan mengelola informasi sebelum merespon perubahan kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan fiskal, peningkatan subsidi atau penurunan pajak pendapatan juga tidak langsung berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga karena perlunya waktu untuk penyesuaian pola konsumsi. Riset (Kilponen & Leitemo, 2011) juga

menyatakan kredibilitas pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan juga mempengaruhi besarnya *time-lag* yang terjadi. Persoalan *time-lag* dapat membuat kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan tidak dapat segera mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi tau bahkan membuat kebijakan menjadi kurang relevan saat dampaknya mulai terjadi. Perencanaan dan penargetan yang optimal menjadi salah satu sarana untuk mengantisipasi persoalan *time-lag*.

2. Konflik tujuan

Kebijakan moneter dan fiskal seringkali memiliki tujuan yang saling bertentangan. Sebagai contoh, bank sentral ingin menjaga inflasi rendah, sementara itu pemerintah tidak mau membatasi pengeluaran publik dan utang publik (Bianchi & Melosi, 2019). Hal ini dapat menimbulkan inflasi yang lebih tinggi, pengetatan moneter, resesi, penumpukan utang lebih lanjut, atau bahkan menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa, ketika kebijakan moneter dan fiskal tidak selaras, hasil yang diinginkan mungkin sulit dicapai. Oleh karena itu perlu, keterpaduan dan koordinasi dari otoritas moneter dan otoritas fiskal untuk mewujudkan kebijakan moneter dan fiskal yang efektif untuk mencapai tujuan perekonomian.

3. Globalisasi

Salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal adalah globalisasi. Seperti telah disinggung sebelumnya, dalam dunia yang semakin terhubung secara global, pergerakan modal, perdagangan internasional, dan kebijakan

ekonomi negara lain dapat memengaruhi efektivitas kebijakan domestik. Salah satu contohnya adalah penurunan suku bunga. Kebijakan bank sentral untuk merubah tingkat bunga bisa mempengaruhi aliran modal keluar atau masuk dan nilai tukar mata uang(dan selanjutnya transaksi perdagangan antar negara). Riset Obstfeld et al. (2015) menyatakan bahwa, meskipun globalisasi menawarkan berbagai macam manfaat untuk banyak negara, globalisasi mengurangi efektivitas kebijakan moneter dalam pencapaian tujuan ekonomi domestik. Akibatnya, penerapan kebijakan moneter lebih sulit untuk diterapkan secara independen.

Buku referensi berjudul Ilmu Ekonomi: Teori, Kebijakan, dan Realitas merupakan buku yang ditujukan untuk masyarakat umum agar dapat memahami prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi secara praktis dan aplikatif. Buku ini membahas hubungan antara teori ekonomi dan kebijakan publik serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini mengulas berbagai topik mulai dari mekanisme pasar, peran pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter, hingga persoalan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan dan krisis. Penjelasan disertai contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga membantu pembaca mengaitkan teori dengan kondisi riil yang terjadi di sekitarnya.

Buku ini sangat relevan dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami ekonomi secara mendasar, mengambil keputusan secara rasional, dan berpartisipasi aktif dalam isu-isu pembangunan sosial dan ekonomi.

